

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Stewardship Theory

Teori *stewardship* ini adalah teori yang diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1989.<sup>28</sup> Teori *stewardship* merupakan hubungan antara pemerintah sebagai *steward* dan masyarakat sebagai *principal* yang didasarkan pada sifat yang dimiliki manusia seperti jujur, amanah, bertanggung jawab, dan berintegritas.

Teori *stewardship* sering dihubungkan dengan organisasi sektor publik, karena pihak *steward* akan bertindak berdasarkan aspirasi *principal*. Yang maknanya pihak pemerintah akan bertugas sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat. Menurut teori ini, seorang pemimpin memiliki ketertarikan untuk mengembangkan dan memajukan organisasinya sehingga seorang pemimpin akan melakukan berbagai cara untuk menjadikan organisasi tersebut maju dan berkembang. *Steward* percaya bahwa dengan memajukan organisasi maka kebutuhan personal dipenuhi, akan berperilaku sesuai dengan kepentingan organisasi atau pemilik.<sup>29</sup> Teori *stewardship* berakar pada ilmu psikologi dan sosiologi yang didesain oleh para peneliti untuk membentuk suatu perilaku yang mengarah pada “sikap melayani”. Pada umumnya teori *stewardship* ini digunakan untuk melakukan pengujian loyalitas perilaku para pemimpin di suatu organisasi.

Dalam penelitian ini, teori *stewardship* menjelaskan peran pemerintah desa sebagai lembaga yang dapat diandalkan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan fungsi dan tugasnya secara tepat. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki lebih banyak informasi diharapkan dapat mewujudkan transparansi terhadap rakyat sesuai dengan harapan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat. Salah satunya dengan melaksanakan pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kemudian untuk meningkatkan Indeks

---

<sup>28</sup> L. Donaldson dan J.H. Davis, ‘Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns’, *Australian Journal of Management*, Vol. 16, No. 1, (1991), *Australian Journal of Management*, 16.1 (1991), 46–66.

<sup>29</sup> Imam Ghozali, *25 Grand Theory* (Semarang: Yoga Pratama, 2020).

Pembangunan Manusia dalam rangka kesejahteraan masyarakat, pemerintah sebagai *steward* bertugas menyiapkan sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam menciptakan standar kehidupan yang layak, pengetahuan yang baik, serta umur panjang dan hidup sehat. Dan untuk mengatasi permasalahan pengangguran, pemerintah sebagai *steward* bertugas untuk mengeluarkan kebijakan yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *stewardship theory* di dalam penelitian ini merupakan teori yang menjelaskan bagaimana pemerintah (*steward*) dapat bekerja sesuai dengan yang telah dipercayakan dan kepentingan masyarakat (*principal*), sehingga tujuan *steward* untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat tercapai.

## 2. Dana Desa

### a. Pengertian Dana Desa

Sebagai upaya pemerintah terhadap pelaksanaan dan fungsi desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka pemerintah mengalokasikan dana desa kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Dana desa ialah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota prioritasnya digunakan terkait pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana desa diartikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa dana desa adalah dana transfer melalui APBD yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk pembangunan desa.

Besaran yang ditetapkan sebesar 10% dari dana luar Dana Transfer Daerah secara bertahap.<sup>30</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai alokasi dana desa (ADD). Alokasi dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.<sup>31</sup>

#### **b. Teori Pertanggungjawaban**

Tanggung jawab dapat diartikan sebagai tindakan pertanggungjawaban (responsibility) atas suatu tindakan yang dilakukan. Menurut Komar Kantaatmaja 1996 menyatakan tanggung jawab professional adalah tanggung jawab hukum (legal liability) dalam hubungan dengan jasa professional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab professional ini dapat timbul karena penyedia jasa tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.

Dalam memberikan pelayanannya, professional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan Cuma-Cuma serta menghasilkan pelayanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa* (Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019).

<sup>31</sup> Pemerintah Republik Indonesia., *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2005).

<sup>32</sup> Roby Aditiya Irfan, Jamaluddin Majid, Mustafa Umar, 'Kuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Al-Muraqabah', *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2.1 (2021), 110–111.

### c. Sumber Dana Desa

Belanja negara merupakan keharusan pemerintah pusat yang dinyatakan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat, dan transfer kepada daerah. Belanja pemerintah pusat menurut jenisnya adalah belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lain-lain dan transfer ke daerah yang termasuk anggaran transfer ke daerah yaitu dana otonomi khusus, dana penyesuaian.<sup>33</sup> Pemerintah menerapkan prioritas dalam penggunaan dana desa setiap tahunnya yaitu dengan memastikan bahwa penggunaan dana desa dapat mencapai sasaran pembangunan desa.<sup>34</sup>

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pada ayat pasal yang diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 Tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang telah dipertimbangkan dan dirumuskan dalam pengalokasian secara berkeadilan berdasarkan:<sup>35</sup>

- 1) Alokasi dasar
- 2) Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/ kota.

### d. Tujuan Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tujuan dari adanya Dana Desa adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Untuk meningkatkan pelayanan publik yang ada di desa.
- 2) Untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di desa.
- 3) Untuk menjadikan perekonomian desa yang lebih baik.

---

<sup>33</sup> Pemerintah Republik Indonesia., *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2003).

<sup>34</sup> Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa*.

<sup>35</sup> Pemerintah Republik Indonesia., *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Pasal 11* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2020), XIX.

<sup>36</sup> Pemerintah Republik Indonesia., *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014).

- 4) Untuk mengatasi terjadinya ketidakseimbangan pembangunan antar desa.
- 5) Untuk memperkuat pembangunan dengan masyarakat sebagai subjeknya.

### 3. Indeks Pembangunan Manusia

#### a. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia diperkenalkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 an. Menurut Badan Pusat Statistik Tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator komposit yang melakukan pengukuran terhadap pembangunan manusia dari 3 aspek primer yakni kesehatan, pendidikan, serta kelayakan hidup. Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator yang penting dalam mengukur keberhasilan suatu upaya pembangunan kualitas hidup penduduk/standar hidup yang layak.<sup>37</sup> Di Indonesia Indeks Pembangunan Manusia merupakan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah yang digunakan dalam Penentuan Dana Alokasi (DAU). Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengklasifikasikan negara maju, negara berkembang, dan mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai dari seberapa besar permasalahan yang dapat diatasi, diantaranya berupa masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan aspek ekonomi lainnya.

#### b. Teori Pembangunan Ekonomi Islam

Teori pembangunan ekonomi Islam oleh para ilmuwan muslim, yaitu Khurshid Ahmad dan Masudul Alam Choudhury:

##### 1) Khurshid Ahmad

Menurut Khurshid Ahmad menguraikan empat filosofis dasar-dasar pendekatan Islam dalam pembangunan, sebagai berikut:

- a) *Tauhid*, yang mengacu kepada pengakuan terhadap keesaan Allah dan kekuasaan-Nya yang menetapkan aturan hubungan antara Tuhan dengan manusia dengan manusia (*hablum-minallah dan hablum-minannas*)

---

<sup>37</sup> 'Badan Pus. Stat.'

- b) *Rububiyah*, Beriman bahwa hanya Allah satu-satunya Rabb yang memiliki, merencanakan, menciptakan, mengatur, memelihara, memberi rezeki, memberikan manfaat, menolak mudharat serta menjaga seluruh alam semesta.
  - c) *Khilafah*, yang menyatakan bahwa manusia adalah wakil Allah di muka bumi untuk memakmurkan bumi dan bertanggung jawab kepada Allah tentang pengelolaan sumber daya yang diamankan kepadanya.
  - d) *Tazkiyah*, yaitu mensucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya dan lingkungannya, masyarakat dan negara.<sup>38</sup>
- 2) Masudul Alam Choudhury
- Masudul Alam Choudhury dalam bukunya *Contributions to Islamic Economic Theory* yang mengatakan bahwa ada lima prinsip dalam perekonomian Islam yang dibutuhkan dalam pembangunan yang kemudian di sebut dengan prisma ekonomi Islam, sebagai berikut:
- a) *Tauhid* (T)  
Sebagai khalifah di bumi, manusia berkewajiban untuk memanfaatkan bumi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya yang serba berkecukupan untuk sebesar-besarnya demi kemaslahatan umat. Untuk mewujudkan prinsip tauhid dan persaudaraan, Islam melarang riba dalam segala bentuk manifestinya. Secara tauhid, Allah SWT sebagai pemilik sumber daya ekonomi telah menentukan bahwa setiap kekayaan adalah untuk kepentingan semua manusia.
  - b) *Work and Productivity* (W)  
Perintah bekerja telah Allah wajibkan semenjak nabi yang pertama, nabi Adam As. sampai nabi yang terakhir Muhammad Saw. Perintah ini tetap berlaku kepada semua orang tanpa membeda-bedakan pangkat, status dan jabatan seseorang.

---

<sup>38</sup> H. Rafsanjani, 'Analisis Islamic Human Development Index Di Indonesia', 2014.

c) *Corporation (C)*

Kerja sama merupakan karakter yang penting dalam sistem ekonomi Islam. Nilai kerja sama ekonomi ini harus dapat dicerminkan dalam semua tingkatan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi barang maupun jasa. Doktrin kerja sama dalam bidang ekonomi ini akan dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, mencegah penindasan ekonomi, distribusi ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata, dan melindungi kepentingan ekonomi dari pihak atau golongan ekonomi lemah.

d) *Ownership (O)*

Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid, pemilik primer lanit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia di bari amanah untuk mengelolanya. Jadi, manusia di anggap sebagai pemilik sekunder.

e) *Distributional Equity (D)*

Sistem ekonomi dalam Islam, berbagai permasalahan perekonomian telah dijamin dalam pengoptimalan distribusi, yaitu dengan cara menentukan tata cara kepemilikan, tata cara mengelola kepemilikan, serta mensuplai orang yang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, Islam telah memecahkan masalah ini dengan instrument zakat yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan yang dapat mencakup perluasan kesempatan kerja, kesejahteraan keluarga, rehabilitasi manusia usia lanjut, asuransi pengangguran, kompensasi bagi yang kekurangan ketika resesi dan depresi.<sup>39</sup>

**c. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi

---

<sup>39</sup> Rafsanjani.

standar hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dapat dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.<sup>40</sup>

Rata-rata geometrik yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Adapun indikator lain yang digunakan dalam pengukuran setiap komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rumus yang digunakan sebagai berikut:

1) Dimensi Kesehatan

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Angka harapan hidup waktu lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

2) Dimensi Pendidikan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (terhitung sejak penduduk berusia tujuh tahun ke atas).

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

3) Dimensi Hidup Layak

Rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian

---

<sup>40</sup> 'Badan Pus. Stat.'



pembangunan untuk hidup layak. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli atau *Purchasing Power Parity (PPP)*. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/ kota.

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaranmin})}{\ln(\text{pengeluaranmaks}) - \ln(\text{pengeluaranmin})}$$

Badan Pusat Statistik menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia antara skala 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya yang semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori sebagai berikut:

- 1) Rendah : < 60
- 2) Sedang :  $60 \leq \text{IPM} < 70$
- 3) Tinggi :  $70 \leq \text{IPM} < 80$
- 4) Sangat Tinggi :  $\text{IPM} \geq 80$

Adapun manfaat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara lain sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat
- 2) Dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara
- 3) Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

#### 4. Tingkat Pengangguran

##### a. Pengertian Pengangguran

Menurut Sadono Sukirno tahun 2004 yang dikutip dalam penelitian Anshori tahun 2018, pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan aktif dalam mencari pekerjaan akan

---

<sup>41</sup> 'Badan Pus. Stat.'

tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan.<sup>42</sup> Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang aktif mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan pekerjaan/usaha baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak akan mendapat pekerjaan, dan penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat.

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Yang dikategorikan dalam angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.<sup>43</sup>

$$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$$

Keterangan:

TPT : Tingkat pengangguran terbuka ( %)

PP : Jumlah pengangguran ( orang)

PAK : Jumlah angkatan kerja ( orang)

#### **b. Teori yang berhubungan dengan pengangguran**

Menurut Yusuf Qrdhawi terhadap pengangguran dalam Islam juga menyimpan perhatian yang besar untuk mengatasi pengangguran dan memerangi kemiskinan. Disebutkan bahwa pengangguran tidak disukai dalam Islam, dalam arti Islam dianjurkan untuk bekerja keras secara halal untuk meningkatkan kesejahteraan orang per orang. Oleh Islam, kemiskinan dianggap sebagai suatu musibah. Apabila kita tidak bersama-sama mengentaskan kemiskinan, maka dapat mengganggu keimanan, aqidah, akhlak, perilaku, cara berpikir, dan sebagainya.

Syariat Islam penuh dengan ajaran yang menyuruh umatnya untuk bekerja dan melarang mereka menganggur. Ajaran tersebut tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist. Jika keduanya diteliti, akan didapati bahwasanya Allah SWT dan Rasul-Nya berulang kali memerintahkan supaya kita bekerja

---

<sup>42</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, 3rd edn (Jakarta: Rajawali Pres, 2012).

<sup>43</sup> 'Badan Pusat Statistik- Tenaga Kerja' <<https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>> [accessed 5 May 2023].

untuk kebajikan kita sendiri di dunia maupun akhirat dalam waktu yang sama. Islam mengajarkan agar kita tidak berpangku tangan tanpa ada suatu pekerjaan yang dilakukan.<sup>44</sup> Allah SWT berfirman dalam surah Q.S At-Taubah ayat 105 yaitu:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ  
وَسْتَذُكَّرُونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا  
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang maha mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”

Ayat ini memerintahkan kita untuk bekerja secara umum, yaitu bekerja untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Setiap pekerjaan ini akan dibalas oleh Allah dengan sesuai, yaitu apabila baik akan dibalas dengan kebaikan dan sebaliknya apabila keburukan yang dilakukan maka keburukan lah yang akan di dapatnya.

### c. Pengangguran Berdasarkan Jenisnya

Menurut Sadono Sukirno tahun 2004 yang dikutip dalam penelitian Anshori tahun 2018, berdasarkan jenisnya pengangguran berdasarkan pemicunya dapat dikategorikan dalam empat kelompok diantaranya yaitu:<sup>45</sup>

#### 1) Pengangguran Friksional (*Frictional Unemployment*)

Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut yang dinamakan pengangguran friksional. Pengangguran Friksional merupakan pengangguran yang sifatnya sementara. Para pengangguran ini tidak bekerja bukan karena tidak memperoleh kerja, melainkan karena sedang mencari pekerjaan lainnya yang lebih baik. Penyebabnya adalah adanya kendala

<sup>44</sup> Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1996).

<sup>45</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, 3rd edn (Jakarta: Rajawali Pres, 2012).

waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan.

- 2) Pengangguran Struktural (*Structural Unemployment*)  
Pengangguran Struktural merupakan keadaan dimana penganggur yang sedang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pembuka lapangan kerja. Adanya pengangguran struktural ini dapat disebabkan oleh kemerosotan suatu industri atau perusahaan. Kemerosotan ini dapat ditimbulkan oleh beberapa faktor seperti wujud barang baru, kemajuan teknologi, biaya pengeluaran yang tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri yang menurun karena persaingan.
- 3) Pengangguran Teknologi  
Pengangguran Teknologi adalah pengangguran yang disebabkan adanya penggantian sumber daya manusia dengan teknologi atau mesin dalam proses produksi.
- 4) Pengangguran Siklikal  
Pengangguran Siklikal diakibatkan dari imbas naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Hal ini dapat ditimbulkan dari efek perusahaan-perusahaan yang mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Sehingga kemerosotan permintaan ini dapat mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup usahanya, sehingga pengangguran akan bertambah. Pengangguran seperti inilah yang dinamakan pengangguran siklikal.

#### **d. Dampak Pengangguran**

- 1) Dampak pengangguran terhadap perekonomian:<sup>46</sup>
  - a) Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Pengangguran menyebabkan pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai lebih rendah dari pada pendapatan nasional potensial. Hal ini menyatakan bahwa tingkat kemakmuran

---

<sup>46</sup> Zulkifli Anshori & I Made Suparta, 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Angkatan Kerja, Dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur (2007-2016)', *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 3.2 (2018), 165–75 <<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/JEB17/article/view/2129>>.

- masyarakat yang dicapai lebih rendah dari pada tingkat yang mungkin dicapainya.
- b) Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah menurun. Pengangguran yang diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah akan menyebabkan pendapatan yang diperoleh pemerintah semakin sedikit. Maka dari itu pengangguran yang tinggi akan mengurangi kemampuan pemerintah dalam menjalankan berbagai kegiatan pembangunan.
  - c) Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi melainkan akan menimbulkan dua akibat buruk pada sektor swasta. Pertama, pengangguran tenaga kerja biasanya akan diikuti dengan kelebihan kapasitas mesin atau teknologi perusahaan. Situasi ini tidak akan mendorong perusahaan untuk melakukan investasi di masa yang akan datang. Kedua, pengangguran yang diakibatkan dari kelesuan kegiatan-kegiatan perusahaan menyebabkan keuntungan berkurang. Keuntungan yang rendah mengurangi keinginan perusahaan untuk melakukan investasi. Kedua hal tersebut jelas tidak akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.
- 2) Dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat:
- a) Pengangguran menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. Di negara maju para pengangguran masih mempunyai pendapatan dikarenakan mereka mendapatkan bantuan keuangan yang berasal dari badan asuransi pengangguran. Sedangkan di negara berkembang tidak terdapat program asuransi pembangunan dan karenanya pengangguran membiayai kehidupannya sendiri melalui tabungan atau pinjaman dari keluarga. Keadaan ini potensial dapat mengakibatkan pertengkaran dan kehidupan keluarga yang tidak harmonis.
  - b) Pengangguran menyebabkan hilangnya keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan suatu pekerjaan dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek.

Pengangguran dalam kurun waktu yang lama mengakibatkan keterampilan pekerjaan menjadi menurun.

- c) Pengangguran menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas nya masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa. Keadaan ini menimbulkan tindakan kriminal seperti pencurian dan perampokan akan semakin meningkat

## 5. Kemiskinan

### a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat kompleks dan multidimensional yang merupakan hambatan pada suatu negara dalam membangun perekonomian. Kemiskinan bersifat kompleks artinya kemiskinan tidak lahir secara tiba-tiba, sedangkan kemiskinan multidimensional dapat dilihat dari banyak kebutuhan masyarakat yang bermacam-macam. Kemiskinan menurut Bappenas ialah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan kehidupannya.<sup>47</sup> Hak-hak dasar tersebut yakni terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari segala jenis tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosial.

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan kondisi seseorang berpenghasilan namun tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan.

Dalam arti luas kemiskinan merupakan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhannya secara relatif sesuai dengan persepsi dirinya. Ketidakmampuan tersebut tidak hanya terdiri dari ketidakmampuan ekonomis saja tetapi juga ketidakmampuan dalam berbagai aspek seperti sosial, politik dan spiritual.

---

<sup>47</sup>

‘Badan

Pusat

Statistik’

<<https://www.bps.go.id/pressrelease/2011/01/27/884/penjelasan-data-kemiskinan.html>>  
[accessed 4 May 2023].

- 1) **Kemiskinan Absolut dan Kemiskinan Relatif**  
Kemiskinan absolut tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum.  
Sedangkan kemiskinan relatif merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.
- 2) **Kemiskinan Mikro dan Kemiskinan Makro**  
Kemiskinan mikro mengacu pada 14 kriteria kemiskinan dengan berbasis pada rumah tangga, antara lain yaitu luas lantai perkapita, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas tempat buang air besar, sumber air minum, sumber penerangan, bahan bakar, membeli daging/ ayam/ susu, frekuensi makan, membeli pakaian baru, kemampuan berobat, lapangan usaha kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, dan aset yang dimiliki rumah tangga.  
Sedangkan kemiskinan makro merupakan kemiskinan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pengukuran makro menyediakan data tentang jumlah penduduk miskin secara agregat yang dihitung dari hasil perkiraan sampel data Susenas.<sup>48</sup>

**b. Teori yang berhubungan dengan kemiskinan**

Menurut Al Ghazali kemiskinan dibagi menjadi dua bagian yaitu kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan material dan kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan spiritual. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan bukan hanya merupakan perampasan barang dan jasa, akan tetapi juga kurangnya ketenangan dalam roh. Rehman juga berpendapat bahwa umat Islam dapat meningkatkan kehidupan rohani mereka dengan meningkatkan kehidupan material mereka. Selanjutnya, Chupra berpendapat bahwa Islam menjadi

---

<sup>48</sup> Apbn, 'Dimensi Kemiskinan'.

agama keseimbangan telah memberikan penelanan yang sama pada kedy spiritual dan duniawi.<sup>49</sup>

### c. Penyebab Kemiskinan

Penyebab terjadinya penduduk miskin di negara berpenghasilan rendah menurut Samuelson dan Nordhaus yaitu karena dua hal pokok, yakni rendahnya tingkat kesehatan dan gizi, dan lambatnya perbaikan mutu pendidikan. Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi hal ini adalah dengan melakukan pemberantasan penyakit, perbaikan kesehatan dan gizi, perbaikan mutu pendidikan, pemberantasan buta huruf dan peningkatan keterampilan penduduk. Kelima hal ini merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia.<sup>50</sup>

Penyebab kemiskinan dalam penelitian Kuncoro tahun 2006 adalah sebagai berikut.<sup>51</sup>

- 1) Secara mikro kemiskinan muncul disebabkan adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Jumlah sumber daya yang dimiliki oleh penduduk miskin sangat terbatas dan berkualitas rendah.
- 2) Kemiskinan muncul akibat dari perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya yang rendah mengakibatkan produktivitas rendah yang juga akan mengakibatkan upah yang diterima rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia disebabkan karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, dan keturunan.
- 3) Kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.

### d. Konsep Al-Qur'an tentang Kemiskinan

Dalam menjelaskan konsep kemiskinan, Al-Qur'an biasa menggunakan term *faqir* dan *miskin*. Secara etimologis, lafadz *faqir* berasal dari kata *faqura-yaqfuru-faqarah*, yang maknanya lawan dari kata (al-ghina). Sedangkan secara terminologis, banyak ulama yang

---

<sup>49</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

<sup>50</sup> Paul A Samuelson, Nordhaus, and D William, *Mikroekonomi* (Jakarta: Erlangga, 1997).

<sup>51</sup> Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah Dan Kebijakan* (Yogyakarta: : UPP APM YKPN, 1997).



mengemukakan makna terminologis tentang *faqir*, salah satunya yaitu pendapat Abu Abdullah al-Qurtubi ketika menginterpretasikan QS. At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan”. (QS. At- Taubah: 09 ayat 60).<sup>52</sup>

Berikutnya term yang banyak digunakan untuk menunjukkan orang yang lemah secara ekonomi adalah term  *miskin*. Secara etimologis, lafadz  *miskin* merupakan isim masdar yang berasal dari  *sakana- yaskunu- sukun/ miskin*. Dilihat dari asalnya,  *sakana- sukun*, kata ini memiliki makna  *diam, tetap* atau  *reda*. Al-Asfhani dan Ibn Mansur mengartikan kata ini sebagai ‘tetapnya sesuatu setelah ia bergerak’. Selain arti tersebut, kata  *sakana- sukun* juga bisa diartikan sebagai ‘tempat tinggal’. Jika dilihat dari makna aslinya yang berarti ‘diam’, maka kata  *miskin* dapat ditarik arti secara istilah, yaitu orang yang tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan diamnya itulah yang menyebabkan kemiskinan. Orang tersebut dapat memperoleh sesuatu dikarenakan ia tidak bergerak dan tidak ada kemauan atau peluang untuk bergerak, sebagaimana yang diisyaratkan dalam QS. Al-Kahfi ayat 79:

﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتْ أَنْ أَعْيَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝٧٩﴾

<sup>52</sup> QS. At-Taubah Ayat 60 (Jakarta: Kemenag RI, 2018).

Artinya: “Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusak bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.” (QS. Al-Kahfi ayat 79)<sup>53</sup>

Selain definisi terminologis menurut pakar agama tersebut, juga timbul perbedaan pendapat dalam menetapkan tolok ukur kemiskinan dan kefakiran. Secara langsung, tidak ada informasi al-Qur’an maupun hadist dalam menetapkan angka tertentu lagi pasti sebagai ukuran kemiskinan. Al-Qur’an hanya menegaskan perintah untuk menyantuni orang fakir dan miskin, larangan menganiaya mereka, larangan memarginalkan dan mendiskreditkan mereka, larangan menumpuk harta, dan lain sebagainya.<sup>54</sup>

#### e. **Kebijakan Mengatasi Kemiskinan**

Dalam Islam upaya untuk mengatasi kemiskinan dilakukan melalui dua cara yaitu pertama, mendorong orang miskin untuk bekerja keras dan kedua mendorong orang kaya untuk membantu orang miskin. Al-qur’an mengajak para hartawan agar menginfakkan sebagian hartanya untuk orang lain. Dengan kata lain, para hartawan wajib memberikan hartanya kepada mereka yang datang meminta dan tidak mempunyai harta (dengan ketentuan khusus). Islam menganjurkan beberapa cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu antara lain:

##### 1) Bekerja

Bekerja merupakan senjata pertama dalam memerangi kemiskinan, karena dengan bekerja orang dapat menghasilkan harta benda (kekayaan). Setiap muslim harus berusaha untuk bekerja baik secara individual maupun kolektif. Dalam QS. Al- Jumu’ah (62) ayat 10 disebutkan:

<sup>53</sup> QS. Al-Kahfi Ayat 9 (Jakarta: Kemenag RI, 2018).

<sup>54</sup> Syaiful Ilmi, ‘Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam’, *Jurnal Al-Maslahah*, 13 (2017), 72–775 <Jurnal Al-Maslahah 13>.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ

اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.” (QS. Al- Jumu’ah ayat 10)<sup>55</sup>

Pada kenyataannya lapangan pekerjaan tidak selalu tersedia, oleh sebab itu dalam Islam pemerintah mempunyai dua kewajiban dalam mengatur hal ini: pertama yaitu, orang kaya perlu memberikan bantuan kepada penganggur. Kedua, pemerintah harus berusaha secara optimal untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Apabila kedua langkah ini belum dapat mengatasi masalah yang ada, maka Islam menganjurkan untuk mencari pekerjaan ke tempat lain. artinya Islam tidak memperbolehkan seorang muslim untuk menyerah apabila lapangan pekerjaan di daerah tempat tinggalnya sudah tidak tersedia lagi. Dengan demikian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan niat dan jenis pekerjaan yang baik adalah sesuai dengan ajaran Islam.

## 2) Jaminan Family Dekat yang Mampu

Islam menempatkan posisi kerabat atau keluarga dekat sebagai orang yang harus peduli dan saling membantu kesulitan kerabat yang lain. mereka yang kuat harus menanggung yang lemah dan yang kaya harus menanggung yang miskin. Ada dua syarat mendasar yang ditentukan oleh ahli fiqih untuk kewajiban ini: pertama, orang yang hendak diberi nafkah adalah orang miskin. Kedua, orang yang memberi nafkah harus memiliki kelebihan harta untuk dinafkahkan.

## 3) Zakat

Dalam Islam, kelompok masyarakat yang tidak bekerja dan tidak pula memiliki keluarga yang mampu untuk membantu akan diberikan bantuan dalam bentuk

<sup>55</sup> QS. Al-Jumu’ah Ayat 10 (Jakarta: Kemenag RI, 2018).

zakat. Tujuan pertama dari zakat adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin. Zakat merupakan bentuk pembuktian bahwa Islam sejak dahulu memberikan perhatian terhadap penyelesaian persoalan kemiskinan dan memberikan perlindungan terhadap fakir miskin, tanpa harus ada perlindungan terhadap fakir miskin.

Secara konseptual, zakat disyariatkan untuk mengubah *mustahiq* (golongan yang berhak menerima zakat), dengan kata lain dari miskin menjadi kaya atau berkecukupan dan kemudian pada gilirannya mampu untuk mengeluarkan zakat.

#### 4) Jaminan Kas Islam dengan Berbagai Sumbernya

Selain zakat, dalam Islam juga juga memberlakukan Baitul Maal (kas Islam) yang dikelola dan dipergunakan untuk kepentingan umum baik dikelola sendiri, disewakan, atau dikelola oleh pihak lain. misalnya wakaf untuk kepentingan umum, pertambangan dan kekayaan alam. Sumber ekonomi itu tidak boleh dipegang dan dipergunakan untuk kepentingan sendiri, melainkan harus berada di tangan Negara agar semua orang dapat merasakan manfaatnya. Seluruh pemasukan terhadap kas Islam merupakan sumber ekonomi bagi fakir miskin, ketika perolehan zakat tidak mencukupi permintaan.

#### 5) Hak-Hak Selain Zakat

Selain zakat, ada banyak hak-hak material lainnya yang harus dipenuhi oleh seorang muslim karena sebab-sebab yang beragam. Hak ini merupakan sumber dana untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin sekaligus berfungsi sebagai sarana untuk menghilangkan kemiskinan. Contohnya adalah hak bertetangga, qurban pada Hari Raya Idul Adha, sanksi pelanggaran sampah (memberikan makan kepada sepuluh orang miskin), sanksi *dhihar* (memberikan makan 60 orang miskin), sanksi melakukan hubungan suami istri dalam bulan Ramadhan (sama dengan sanksi *dhihar*), sanksi *fidyah*, sanksi *hady* (pemberian orang yang melakukan haji atau umrah berupa unta, sapi atau kambing) akibat melakukan sesuatu yang dilarang waktu ihram, dan hak tanggungan fakir miskin jika harta zakat tidak mencukupi.

## 6) Derma Sukarela dan Kebajikan Individual

Islam mengupayakan pembentukan pribadi yang luhur, dermawan dan berani berkorban. Yaitu figur pribadi yang bisa memberikan lebih banyak dari yang diminta, menginfakkan lebih dari yang diwajibkan, bahkan bisa memberi tanpa diminta sekalipun dalam setiap situasi dan kondisi.<sup>56</sup>

f. **Perintah Al-Qur'an dan Hadist untuk Membantu Orang-Orang Miskin**

Islam tidak mentolerir segala bentuk kemiskinan bag para pemeluknya. Untuk itu Islam memerintahkan kepada umatnya untuk berzakat, berinfak, membiayai peperangan itu sendiri, diperintahkan untuk menjalankan haji dan sebagainya. Hal ini seperti yang tertuang dalam QS Al-Anfal ayat 60:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ  
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا  
تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ<sup>ج</sup> وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah SWT, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah SWT mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah SWT niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan didzalimi (dirugikan), ( QS. Al-Anfal ( 8): 60)<sup>57</sup>

Dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam itu mendorong masyarakatnya untuk memiliki harta kekayaan dalam menghadapi musuh Islam. Kemiskinan merupakan

<sup>56</sup> Jusmaliani, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005).

<sup>57</sup> QS. Al-Anfal Ayat 60 (Jakarta: Kemenag RI, 2018).

musuh besar umat Islam sehingga mereka berkewajiban melawan kemiskinan yang menderanya.

Islam dengan ajarannya yang suci selalu memberikan jalan keluar bagaimana seharusnya menghadapi kemiskinan. Umat Islam yang kaya diperintahkan untuk menyantuni mereka yang hidupnya serba kekurangan. Sesuai dalam firman-Nya, Allah SWT menganalogikan bahwa orang yang membiarkan sesamanya kelaparan sama saja dengan mendustakan agama yang agung. Al-Qur'an mewajibkan kepada setiap muslim untuk berpartisipasi menanggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang tidak memiliki kemampuan material, maka paling sedikit partisipasinya diharapkan dalam bentuk merasakan, memikirkan, dan mendorong pihak lain untuk berpartisipasi aktif.

Dalam Al- Qur'an menjelaskan bahwa orang yang enggan berpartisipasi akan dijuluki sebagai orang yang telah mendustakan agama dan hari kemudian, seperti yang tercantum didalam QS. Al- Ma'un ayat 1-3 yang artinya: "Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin." (QS. Al-Ma'un (107): 1- 3)<sup>58</sup>

Di dalam ayat tersebut secara tegas Islam mengharuskan untuk memberikan santunan kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Namun arti sesungguhnya dari ayat tersebut adalah bahwa umat Islam yang hidupnya berkecukupan secara materi dan akhirnya mampu menjalankan perintah agama secara tenang.<sup>59</sup>

#### g. **Kriteria Kemiskinan**

Kriteria fakir dan miskin sebagaimana telah dipaparkan dalam QS At-Taubah ayat 60, mereka adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat. QS Al-Kahfi ayat 79 menegaskan bahwa orang miskin itu lebih baik keadaannya daripada orang fakir karena orang miskin memiliki bahtera yang dapat dijadikan alat untuk mencari nafkah. Begitu pula yang terdapat dalam QS al-Balad ayat 16 yang menjelaskan keadaan miskin yang sangat.

---

<sup>58</sup> QS. Al-Ma'un Ayat 1-3 (Jakarta: Kemenag RI, 2018).

<sup>59</sup> Bayu Tri Cahya, 'Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Al-Quran Dan Hadis', *Jurnal Penelitian*, 1 (2015), 52-54.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa kriteria seseorang dikatakan miskin atau fakir jika orang tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>60</sup>

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh World Bank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp. 7.057 per orang per hari yang berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per hari.<sup>61</sup>

#### **h. Langkah-langkah Pengentasan Kemiskinan dalam Upaya Membangun Kesejahteraan Umat**

Secara umum ada tiga gejala kemiskinan, yaitu:

- 1) Kemiskinan Natural, yaitu kemiskinan yang dialami oleh seseorang sejak lahir.
- 2) Kemiskinan Kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor kultural, seperti gaya hidup malas bekerja sehingga terjerembab dalam jurang kemiskinan.
- 3) Kemiskinan Struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya sistem atau struktur yang mencegah sebagian besar orang untuk menjadi kuat, sejahtera, bahkan kaya.

Dari uraian tersebut, langkah-langkah penanggulangan kemiskinan bisa dijalankan melalui tiga hal, yaitu:

---

<sup>60</sup> Cahya.

<sup>61</sup> 'Badan Pusat Statistik' <<https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>> [accessed 5 May 2023].

### 1) Rekonstruksi Teologi Kemiskinan

Rekonstruksi teologis yang dimaksud adalah bagaimana merubah cara pandang dan logika berpikir tentang kemiskinan. Kemiskinan lahir bukan semata-mata disebabkan oleh takdir, melainkan lebih kepada penganiayaan terhadap diri sendiri. Dapat dikatakan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan, atau tidak mau bergerak atau berusaha, dan keengganan berusaha adalah bentuk penganiayaan terhadap diri sendiri.

Dalam konteks kemiskinan, rekonstruksi teologis yang dimaksud adalah melakukan perubahan sosial yang dimulai dari perubahan individu yang meliputi pola pikir, motivasi, pandangan hidup dan segala aspek terkait lainnya. Jika pola pikir masyarakat miskin meniscayakan bahwa miskin adalah takdir Allah, maka keluar dari cengkeraman kemiskinan adalah takdir Allah juga.

### 2) Membangun Kesadaran Kolektif Pemberantasan Kemiskinan

Konsep dasar dalam ajaran Islam adalah bahwa setiap orang harus memerangi kemiskinan dengan cara berusaha dan bekerja. Fenomena seperti janda yang ditinggal mati suaminya dan tidak memiliki simpanan harta yang cukup, para orang tua jompo, orang yang memiliki penyakit kronis sehingga tidak mampu lagi untuk bekerja, menegaskan bahwa kemiskinan bukan hanya menjadi beban pribadi tetapi juga menjadi beban dan tanggung jawab bersama untuk menanggulangnya. Dalam hal menanggulangi kemiskinan sangat diperlukan adanya kesadaran bersama yang dibangun, baik kesadaran yang sifatnya personal atau individu yang dilakukan oleh masyarakat, maupun kesadaran penuh yang menjadi tanggung jawab pemerintah melalui kebijakannya.

#### a) Kesadaran personal

Terdapat banyak dalam ayat al-Qur'an yang mengupayakan pembentukan pribadi luhur, dermawan, dan berani berkorban. seperti dalam QS ar-Rum ayat 38 yang artinya: "Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-



orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung.” ( QS ar-Rum ( 30): 38)<sup>62</sup>

Dalam ayat lain, betapa Allah menjanjikan balasan yang sangat besar kepada setiap individu yang mendermakan hartanya kepada sesama, khususnya kepada masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Allah SWT menegaskan dalam QS al-Baqarah ayat 245:

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada- Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS al-Baqarah ( 02): 245)<sup>63</sup>

Makna ‘pinjaman’ yang dimaksud dalam ayat tersebut, menurut Ibn Katsir sebagaimana pendapat yang bersumber dari Umar dan beberapa ulama lainnya, adalah infak di jalan Allah. dengan demikian, maksud dari ayat tersebut adalah barangsiapa yang membantu sesama, baik orang lain maupun keluarga, maka Allah akan melipatgandakan pemberian tersebut. Islam sudah seharusnya memperhatikan aspek moral yang luhur, dan tidak mencukupkan pada hak-hak seperti yang diatur dalam undang-undang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Karena aspek legal dan dilaksanakan oleh pemerintah bukanlah satu-satunya sarana untuk merealisasikan solidaritas antar manusia. Islam bukan hanya memperhatikan moralitas yang luhur, tapi lebih dari itu, Islam mendorong terbentuknya pribadi yang sholeh.

b) Peran Pemerintahan

Peran pemerintah sangatlah menentukan baik dalam membuat masyarakat menjadi miskin, maupun keluar dari kemiskinan. Kebijakan yang kurang tepat dan ketidakberpihakan terhadap masyarakat

---

<sup>62</sup> QS. Ar-Rum Ayat 38.

<sup>63</sup> QS. Al-Baqarah Ayat 245 (Jakarta: Kemenag RI, 2018).

miskin akan menciptakan kemiskinan yang semakin akut. Selama ini beberapa kebijakan yang notabene diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan masih banyak yang bersifat konsumtif. Seperti bantuan beras untuk rakyat miskin (raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan subsidi lainnya yang kurang tepat sasaran seperti BBM dan listrik yang kebanyakan dinikmati masyarakat yang tidak tergolong 'miskin'.

Di sisi yang berbeda, terdapat program pemerintah yang bersifat produktif. Misalnya kebijakan program PNPM Mandiri Perdesaan dengan total anggaran Rp.10,3 Triliun pada tahun 2013, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan lain sebagainya. Hanya saja dalam realitasnya program pemerintah tersebut belum berjalan maksimal, bahkan dengan adanya anggaran yang begitu besar sedangkan tindakan pengawasan tidak berjalan dengan baik, dikhawatirkan program-program tersebut bisa jadi akan dijadikan lumbung 'pencurian uang rakyat' oleh para koruptor.

Dalam hal ini diharapkan komitmen pemerintah yang besar dalam menanggulangi kemiskinan ini dapat menghasilkan pertumbuhan yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada rakyat miskin, dibukanya sektor lapangan kerja seluas-luasnya agar angka pengangguran dapat ditekan sekecil mungkin, membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, perbaikan sektor sarana dan prasarana pendidikan sehingga dapat melahirkan SDM yang lebih baik, dan lain sebagainya sehingga mampu menciptakan pertumbuhan untuk semua secara adil dan merata.

Dalam pengentasan kemiskinan, baik pemerintah maupun masyarakat secara personal harus mengerahkan segala kemampuan, berusaha memenuhi kebutuhan serta memanfaatkan potensi yang dimiliki, baik potensi *basyariyah* (kemanusiaan) atau potensi material untuk selalu berusaha menghancurkan 'taring-taring' kemiskinan dan menjinakkan keganasannya. Dengan semakin bertambahnya produksi dan

semakin meningkatnya pemasukan secara umum akan berdampak positif dan efektif dalam memerangi masalah kemiskinan.

c) Membangun Etos Kerja Individu

Cara terakhir dalam memberantas kemiskinan adalah dengan cara membangun etos kerja. Pada hakikatnya, etos kerja merupakan bagian dari konsep Islam tentang manusia karena etos kerja merupakan bagian dari proses eksistensi diri manusia dalam lapangan kehidupannya yang amat luas dan kompleks. Etos kerja dalam Islam merupakan refleksi pribadi seseorang yang bekerja dengan bertumpu pada kemampuan konseptual yang bersifat kreatif dan inovatif. salah satu ayat Al-Qur'an yang mendorong setiap individu untuk membangun etos kerja ada pada QS. Al-Jumu'ah ayat 10, yang memiliki arti: "Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". ( QS. Al- Jumu'ah [ 62]: 10)<sup>64</sup>

Etos kerja merupakan senjata utama dalam memerangi kemiskinan. Etos kerja adalah sarana pertama untuk menghasilkan harta benda dan membangun kesejahteraan masyarakat. Dalam etos kerja terkandung "spirit" atau semangat untuk mengubah sesuatu menjadi jauh lebih baik. Etos kerja juga dapat memerangi kemiskinan sehingga seseorang dapat dan mampu keluar dari jurang kemiskinan.<sup>65</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Pada Tabel 2.1 akan diuraikan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung terhadap penelitian ini. Melalui penelitian terdahulu maka dapat diketahui pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen yang telah di uji pada penelitian sebelumnya dan dapat mendukung penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Adapun paparan mengenai penelitian-penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> QS. Al-Jumu'ah Ayat 10.

<sup>65</sup> Ilmi.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Sayifullah dan Tia Ratu Gandasari  <i>Jurnal Ekonomi-Qu, Vol. 6, No. 2, 2016</i>	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan ada pengaruh antara variabel indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan. Kemudian secara parsial variabel indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan
	Persamaan: a. Menggunakan Dana Desa sebagai variabel independen b. Menggunakan Tingkat Kemiskinan sebagai variabel dependen  Perbedaan:		

	<p>a. Pada penelitian terdahulu menambahkan Kesejahteraan Masyarakat sebagai variabel dependen, sedangkan pada penelitian ini menambahkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran sebagai variabel independen</p> <p>b. Pada penelitian ini menggunakan <i>software</i> SPSS 21 dengan analisis linier berganda, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan <i>software</i> Eviews dengan regresi data panel</p>		
2	<p>Dianti Lalira, Amran T. Nakoko, Ita Pingkan F. Rorong</p> <p><i>Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 18, No. 4, 2018</i></p>	<p>Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa dan alokasi dana desa tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan. Secara simultan dana desa dan alokasi dana desa tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan</p>
	<p>Persamaan:</p> <p>a. Menggunakan Dana Desa sebagai variabel independen</p> <p>b. Menggunakan Kemiskinan sebagai variabel dependen</p> <p>Perbedaan:</p> <p>a. Pada penelitian terdahulu menambahkan Alokasi Dana Desa sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian ini menambahkan Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran sebagai variabel independen</p> <p>b. Pada penelitian ini menggunakan <i>software</i> SPSS 21 dengan analisis linier berganda, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan <i>software</i> Eviews</p>		

dengan regresi data panel			
3	<p>Made Krisna Kalpika Sunu dan Made Suyana Utama</p> <p><i>E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vo. 8, No. 8, 2019</i></p>	<p>Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bali</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.</p>
<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan Dana Desa sebagai variabel independen</li> <li>b. Menggunakan Tingkat Kemiskinan sebagai variabel dependen</li> </ul> <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pada penelitian terdahulu menambahkan Kesejahteraan Masyarakat sebagai variabel dependen, sedangkan pada penelitian ini menambahkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran sebagai variabel independen</li> <li>b. Pada penelitian ini menggunakan <i>software</i> SPSS 21 dengan analisis linier berganda, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan <i>software</i> Eviews dengan regresi data panel</li> </ul>			
4	<p>Saparuddin Mukhtar, et al</p> <p><i>Jurnal Ecoplan,</i></p>	<p>Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan</p>

	<i>Vol. 2, No. 2, 2019</i>	Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan di Indonesia	Manusia berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Sementara itu pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan
	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran sebagai variabel independen</li> <li>Menggunakan Kemiskinan sebagai variabel dependen</li> <li>Menggunakan <i>software</i> SPSS dengan analisis regresi linier berganda</li> </ol> <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penelitian ini menambahkan Dana Desa sebagai variabel independen</li> </ol>		
5	R. Bambang Budhijana  <i>Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan, Vol. 5, No. 1, 2019</i>	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2000-2017	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat

			kemiskinan. Pengangguran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan
	Persamaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran sebagai variabel independen</li> <li>Menggunakan Kemiskinan sebagai variabel dependen</li> </ol> Perbedaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pada penelitian ini menambahkan Dana Desa sebagai variabel independen</li> <li>Pada penelitian ini menggunakan <i>software</i> SPSS 21 dengan analisis linier berganda, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan <i>software</i> Eviews dengan regresi data panel</li> </ol>		
6	Mufti Arief Arfiansyah  <i>Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol. 1, No. 1, 2020</i>	Pengaruh Dana Desa dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh  Dampak Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.
	Persamaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan Dana Desa sebagai variabel independen</li> <li>Menggunakan Kemiskinan sebagai variabel dependen</li> </ol> Perbedaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pada penelitian ini menambahkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat                 </li> </ol>		



	<p>Pengangguran sebagai variabel independen</p> <p>b. Pada penelitian ini menggunakan <i>software</i> SPSS 21 dengan analisis linier berganda, sedangkan pada penleitian terdahulu menggunakan <i>software</i> Eviews dengan regresi data panel</p>		
7	<p>Heri Tarmizi dan Miksalmina</p> <p><i>Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM), Vol. 5, No. 4, 2020</i></p>	<p>Pengaruh Dana Desa dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh</p>	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa dana desa berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan</p>
	<p>Persamaan:</p> <p>a. Menggunakan Dana Desa dan Indeks Pembangunan Manusia ( IPM) sebagai variabel independen</p> <p>b. Menggunakan Kemiskinan sebagai variabel dependen</p> <p>Perbedaan:</p> <p>a. Pada penelitian ini menambahkan Tingkat Pengangguran sebagai variabel independen</p> <p>b. Pada penelitian ini menggunakan <i>software</i> SPSS 21 dengan analisis linier berganda, sedangkan pada penleitian terdahulu menggunakan <i>software</i> Eviews dengan regresi data panel</p>		
8	<p>Tri Angga Sigit dan Ahmad Kokasih</p> <p><i>Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan</i></p>	<p>Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia</p>	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa penyaluran dana desa berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk</p>

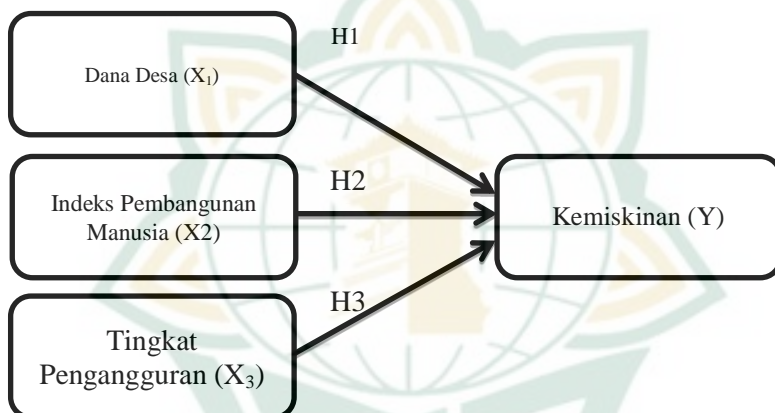
	<i>Publik, Vol. 5, No. 2, 2020</i>		miskin. Variabel lain meliputi alokasi dana desa dan PDRB berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap penduduk miskin
	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan Dana Desa sebagai variabel independen</li> <li>b. Menggunakan Kemiskinan sebagai variabel dependen</li> </ul> <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pada penelitian terdahulu menggunakan Alokasi Dana Desa sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian ini menambahkan Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran sebagai variabel independen</li> <li>b. Pada penelitian ini menggunakan <i>software</i> SPSS 21 dengan analisis linier berganda, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan <i>software</i> Eviews dengan regresi data panel</li> </ul>		
9	Eri Bukhari  <i>Jurnal Kajian Ilmiah, Vol. 21, No. 2, 2021</i>	Pengaruh Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan Penduduk Desa	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.
	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan Dana Desa sebagai variabel</li> </ul>		

	<p>independen</p> <p>b. Menggunakan <i>software</i> SPSS dengan analisis regresi linier berganda</p> <p>Perbedaan:</p> <p>a. Pada penelitian terdahulu menggunakan jumlah penduduk miskin pedesaan sebagai variabel dependen, sedangkan pada penelitian ini menggunakan Tingkat Kemiskinan sebagai variabel dependen .</p> <p>b. Penelitian ini menambahkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran sebagai variabel independen</p>		
10	<p>Ristanto Abdullah</p> <p><i>Jambura Economic Education Journal, Vol. 4, No. 2, 2022</i></p>	<p>Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Gorontalo</p>	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan dengan arah hubungan negatif terhadap Tingkat Kemiskinan</p>
	<p>Persamaan:</p> <p>a. Menggunakan Dana Desa sebagai variabel independen</p> <p>b. Menggunakan Kemiskinan sebagai variabel dependen</p> <p>Perbedaan:</p> <p>a. Pada penelitian ini menambahkan Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran sebagai variabel independen</p> <p>b. Pada penelitian ini menggunakan <i>software</i> SPSS 21 dengan analisis linier berganda, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan <i>software</i> Eviews dengan regresi data panel</p>		

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yaitu model dalam konsep mengenai bagaimana teori berkesinambungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>66</sup> Berdasarkan pada landasan teori yang telah diuraikan diatas mengenai variabel Dana Desa ( $X_1$ ), Indeks Pembangunan Manusia ( $X_2$ ), Tingkat Pengangguran ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap tingkat Kemiskinan ( $Y$ ). maka model kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



### D. Hipotesis Penelitian

#### 1. Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan

Dana desa ialah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota prioritasnya digunakan terkait pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>67</sup>

Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tarmizi dan Miksalmina dengan judul “Pengaruh Dana Desa dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa

<sup>66</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015).

<sup>67</sup> Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa*.

dana desa berpengaruh positif dan signifikan.<sup>68</sup> Selain itu juga sejalan dengan penelitian Abdullah tahun 2022 dengan judul “Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Gorontalo” yang menyatakan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan dengan arah hubungan negatif terhadap Tingkat Kemiskinan.<sup>69</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: *Dana Desa* berpengaruh signifikan terhadap *Kemiskinan*

## 2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia yaitu penduduk yang dapat akses pembangunan yang memperoleh pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator yang penting dalam mengukur keberhasilan suatu upaya pembangunan kualitas hidup penduduk/standar hidup yang layak.<sup>70</sup>

Kualitas sumber daya manusia dilihat dari tingkat pendidikan dan kesehatan. Apabila tingkat pendidikan dan kesehatan tinggi maka akan menyebabkan produktivitas yang tinggi sehingga akan terjadi peningkatan pada pendapatan. Apabila tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat pendapatan tinggi, maka Indeks Pembangunan Manusia juga akan tinggi. Sebaliknya, jika Indeks Pembangunan Manusia rendah maka akan mengakibatkan pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah akan berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan, sehingga dengan rendahnya pendapatan akan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia baik dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tarmizi dan Miksalmina dengan judul “Pengaruh Dana Desa dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.<sup>71</sup> Selain itu juga sejalan dengan

---

Manusia<sup>68</sup> Heri Tarmizi, & Miksalmina, “Pengaruh Dana Desa dan Indeks Pembangunan

<sup>69</sup> Abdullah.

<sup>70</sup> ‘Badan Pus. Stat.’

<sup>71</sup> Tarmizi and Miksalmina.

penelitian Dewintari tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua” yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.<sup>72</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: *Indeks Pembangunan Manusia* berpengaruh signifikan terhadap *Kemiskinan*

### 3. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang aktif mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan pekerjaan/usaha baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak akan mendapat pekerjaan, dan penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.<sup>73</sup> Turunnya kesejahteraan masyarakat yang dikarenakan menganggur akan meningkatkan penduduk terjebak didalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Pengangguran yang tercipta akibat dari penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari penambahan tenaga kerja. Pengangguran terbuka juga dapat diakibatkan dari kegiatan ekonomi yang menurun, kemajuan teknologi, dan kemunduran perkembangan suatu industri.<sup>74</sup>

Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Budhijana tahun 2019 dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2000- 2017”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.<sup>75</sup> Selain itu juga sejalan

---

<sup>72</sup> Indah Dewintari Sinaga, ‘PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM), PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 – 2019’, 2020, 50.

<sup>73</sup> ‘Badan Pusat Statistik- Tenaga Kerja’.

<sup>74</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, 3rd edn (Jakarta: Rajawali Pres, 2012).

<sup>75</sup> R. Bambang Budhijana, ‘Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Index Pembangunan Manusia (IPM) Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2000-2017’, *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of*

dengan penelitian Andhykha et al tahun 2018 dengan judul “Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah” yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.<sup>76</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: *Tingkat Pengangguran* berpengaruh signifikan terhadap *Kemiskinan*



---

*Economics, Management and Banking*, 5.1 (2020), 42  
<<https://doi.org/10.35384/jemp.v5i1.170>>.

<sup>76</sup> Ridho Andhykha, Herniwati Retno Handayani, and Nenik Woyanti, ‘Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, Dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah’, *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33.2 (2018), 113–23  
<<https://doi.org/10.24856/mem.v33i2.671>>.